

SKRIPSI

ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN DAN KEPENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KELURAHAN REJOSARI KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Megikuti Ujian Oral Comprehensif
Sarjana Lengkap Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru*



OLEH :

WIRA HUSNI
NIM.

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2010**

ABSTRAK

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengembangkan berbagai inovasi penyempurnaan layanan publik, antara lain dengan mendirikan Dinas Perizinan sebagai institusi yang berdiri sendiri, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik, efektif serta efisien, murah dan lebih cepat. Termasuk beberapa inovasi yang diarahkan untuk mencegah tindakan yang mengarah korupsi dan melakukan beberapa pungutan tidak resmi dalam layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik dan lebih memuaskan masyarakat tersebut, maka di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah pula memberikan dan melakukan pelayanan terhadap warga masyarakatnya dalam kepengurusan dan kepemilikan KTP. Namun, seiring dengan diberlakukannya sistem baru, Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak lagi mengetahui persis tepatnya berapa banyak dari jumlah warga masyarakatnya yang mengurus dan memiliki KTP, kecuali yang meminta surat untuk diteruskan ke kantor Disdukcapil yang sifatnya hanya surat pengantar saja. Bagaimanakah tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru? Adapun Tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Ada faktor-faktor yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam hal ini yaitu: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, jarak tempat tinggal, sikap dan penyuluhan yang diberikan. Dengan pengembangan pembahasan, maka penelitian yang akan dianalisis meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan melihat faktor tingkat pendidikan, biaya, waktu, perilaku pegawai, dan sosialisasi, serta administrasi birokrasi. Dari hasil penelitian sehingga dapat dianalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih rendah, akibat masih terdapat kekurangan atau kelemahan pada aparatur pemerintahan yang belum maksimal dan serius memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tersebut terutama terletak pada faktor penerapan biaya, perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi. Untuk itu maka pemerintah perlu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dalam meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, serta perlu meningkatkan pengawasan maupun evaluasi terhadap faktor biaya, perilaku pegawai, sosialisasi, maupun administrasi birokrasi, dan di samping itu perlu meningkatkan atau memberikan lebih banyak fungsi-fungsi dari Kartu Tanda Penduduk, sehingga menjadikan masyarakat lebih berpartisipasi lagi dalam hal kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.

DAFTAR ISI

Halaman:

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
I. 1. Latar Belakang Masalah	1
I. 2. Rumusan Masalah	7
I. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
I. 4. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
II. 1. Tinjauan Pustaka.....	10
II.2. Hipotesis	16
II.3. Konsep Operasional	16

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

III. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	20
III. 2. Jenis dan Sumber Data	20
III. 3. Metode Pengumpulan Data	21
III. 4. Populasi dan Sampel Penelitian.....	22
III. 5. Analisis Data	24

BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

IV. 1. Keadaan Geografis	25
IV. 2. Penduduk dan Mata Pencaharian	25
IV. 3. Tugas Pokok dan fungsi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	26

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V. 1. Hasil Observasi.....	31
V. 2. Hasil Kuesioner	32
V. 3. Hasil Wawancara	50

BAB VI PENUTUP

VI. 1. Kesimpulan.....	59
VI. 2. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA.....	62
---------------------	----

Lampiran

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai bangsa dan negara yang sedang dalam tahap mematangkan pemahaman dan penghayatan sistem demokrasi, partisipasi atau keterlibatan rakyat merupakan suatu hal yang cukup signifikan. Dalam sistem demokrasi, keberadaan rakyat sebagai subyek merupakan prasyarat yang tak terhindarkan.

Semakin tinggi tingkat keterlibatan rakyat sebagai subyek dari sistem demokrasi, pada akhirnya menunjukkan tingkat kepercayaan sekaligus kepuasan mereka terhadap penyelenggaraan layanan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, demi menjaga berlangsungnya proses demokratisasi, dibutuhkan pengawasan yang secara langsung menempatkan rakyat sebagai subyek.

Tingkat pemahaman rakyat terhadap demokrasi, salah satunya diwujudkan dalam keterlibatan (partisipasi) mereka, mulai dari proses pembuatan (rancangan), penetapan, pelaksanaan hingga evaluasi (monitoring) sebuah aturan.

Dalam pada itu, sebagai tindak-lanjut Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, telah disusun suatu Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) 2004-2009 dan aturan lain yang terkait. Hal itu kemudian ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan menyusun rencana aksi daerah untuk mendukung percepatan pemberantasan korupsi. Dengan arti kata bahwa sudah terbuka komitmen dan peluang melakukan langkah-langkah/upaya kongkrit yang akan dilakukan oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) 1 mempercepat perbaikan/penyempurnaan kebijakan

dan/atau kelembagaan dalam mewujudkan layanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengembangkan berbagai inovasi penyempurnaan layanan publik, antara lain dengan mendirikan Dinas Perizinan sebagai institusi yang berdiri sendiri, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik, efektif serta efisien, murah dan lebih cepat. Termasuk beberapa inovasi yang diarahkan untuk mencegah tindakan yang mengarah korupsi dan melakukan beberapa pungutan tidak resmi dalam layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk atau KTP.

Layanan pengurusan KTP dipilih terutama didasari kepentingan untuk mengetahui efektivitas pengembangan layanan dan implementasi program pembaruan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Kepengurusan KTP diatur dalam Perda No.08 Tahun 2000 Tentang Pendaftaran Penduduk, pada pasal 29 disebutkan Setiap penduduk yang berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah kawin, wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). ([www. pekanbaru.bpk.go.id](http://www.pekanbaru.bpk.go.id)) . kemudian disempurnakan lagi dengan Perda No. 06 Tahun 2008 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. ([www. pekanbaru.bpk.go.id](http://www.pekanbaru.bpk.go.id))

Untuk mewujudkan bagian dari layanan publik tersebut, diharapkan pula partisipasi masyarakat untuk juga dapat mentaati aturan-aturan yang telah digariskan oleh pelaksana pembangunan yaitu Pemerintah dalam hal kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP).

Untuk keseimbangan program tersebut, akhir-akhir ini banyak dilakukan razia *yustisi* terhadap warga masyarakat di beberapa tempat di wilayah Kota Pekanbaru. Tujuannya agar menertibkan warga masyarakat baik yang sudah tinggal lama maupun yang datang baru ke

Kota Pekanbaru, disamping juga untuk mendata warga masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

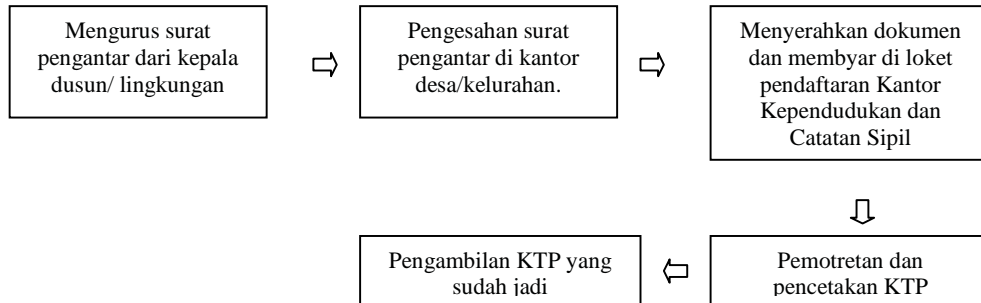
“Mereka yang terbukti tidak punya KTP, kami data”, demikian dikatakan oleh Kepala Satpol PP Indra Kesuma, S.H. (Pekanbaru Pos, 2009:24). Setelah didata lalu dilakukan pengisian surat pernyataan supaya mereka segera mengurus KTP.

Tampaknya memang masyarakat masih perlu untuk dibina agar tertib dan berdisiplin diri untuk mentaati aturan-aturan yang telah digariskan Pemerintah guna dapat mencapai harapan dan kebaikan bersama.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pekanbaru merupakan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kota Pekanbaru yang bergerak di bidang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Seperti SKPD lainnya, dinas ini berada langsung di bawah kendali dan wewenang Walikota. Oleh sebab itu, maka pelayanan publik yang diberikan dilakukan oleh aparat pemerintahan yang dimulai dari tingkat RT, RW dan kelurahan hingga kecamatan lalu ke tingkat Walikota.

Untuk alur pelayanan kepengurusan dan kepemilikan KTP dengan sistem baru, dapat dilihat dalam bagan di bawah ini. Sedangkan untuk perpanjangan dan pergantian KTP, proses pengurusan dimulai dengan penyerahan dokumen di kantor Kependudukan dan Catatan Sipil saja.

BAGAN 1. 1
PROSEDUR PENGURUSAN KTP DI KOTA PEKANBARU



Sumber: Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru.

Proses pengurusan KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berlangsung seluruhnya dalam 1 hari (hari yang sama), jika persyaratan yang dibawa pemohon sudah lengkap. Diharapkan dengan pelayanan tersebut mendorong warga masyarakat untuk mengurus sendiri KTP mereka. Tidak menggunakan perantara seperti yang banyak terjadi sebelumnya.

Dalam upaya memberikan layanan yang lebih baik dan lebih memuaskan masyarakat, maka di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, telah pula memberikan dan melakukan pelayanan terhadap warga masyarakatnya dalam pengurusan dan kepemilikan KTP. Namun, seiring dengan diberlakukannya sistem baru tersebut, maka Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak lagi mengetahui secara pasti warga masyarakatnya dalam memiliki KTP, melainkan kantor Disdukcapil sendiri yang berkewenangan mengeluarkan KTP, sehingga pihak Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak memiliki data persis tepatnya berapa banyak dari jumlah warga masyarakatnya yang mengurus dan memiliki KTP, kecuali yang meminta surat untuk diteruskan ke kantor Disdukcapil yang sifatnya hanya surat pengantar saja.

Berikut tabel kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya, tiga tahun mulai tahun 2007 hingga tahun 2009:

Tabel 1. 1 : Data Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (Ktp) Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya

No.	Tahun	Jumlah Penduduk	Penduduk yg sudah memiliki KTP	Penduduk yg sedang mengurus KTP
1.	2007	29.837	17.302	2.726
2.	2008	29.895	17.629	2.451
3.	2009	29.924*	-	-
-	-	-	-	-

Sumber: Data Primer Tahun 2009.

Keterangan : *per 1 Mei 2009.

Dari tabel 1. 1 di atas, dapat dilihat perkembangan jumlah penduduk yang ada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Tahun 2007 dengan jumlah penduduk 29.837 jiwa, penduduk yang memiliki KTP sebanyak 17.302 jiwa, dan yang sedang melakukan pengurusan KTP sebanyak 2.726 jiwa. Untuk tahun 2008 seiring meningkatnya jumlah penduduk hingga mencapai 29.895 jiwa, terdapat peningkatan jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 17.629 jiwa, sementara yang sedang mengurus KTP sebanyak 2.451 jiwa, dari keterangan diatas dapat dilihat terjadi penurunan jumlah penduduk yang sedang mengurus KTP antara tahun 2007 ke tahun 2008, sedangkan di tahun 2009 juga terdapat peningkatan jumlah penduduk sebesar 29 jiwa, sehingga jumlah penduduknya sebanyak 29.924 jiwa, namun jumlah penduduk yang memiliki KTP dan jumlah penduduk yang sedang mengurus KTP tidak diketahui dengan jelas. hal itu dikarenakan adanya perpindahan kepengurusan KTP ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Dari hal tersebut di atas, permasalahan yang timbul sekarang adalah bahwa dengan dialihkannya administrasi pembuatan KTP ke Disdukcapil, maka kepemilikan dan

kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) masyarakat di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak lagi dapat diketahui dengan tepat dan nyata jumlahnya, kecuali diadakan razia KTP kepada masyarakat atau pendataan ulang kembali yang tentunya akan menimbulkan biaya yang lebih besar lagi.

Dengan diadakannya razia atau pun pendataan ulang kepada masyarakat, seolah-olah bahwa partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) sudah tidak ada lagi.

Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang akan penulis tuangkan ke dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi sebagai penyelesaian tugas akhir penulis di Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, dengan diberi judul:

“Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”.

I.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dalam tulisan ini akan diteliti dan dibahas permasalahan mengenai bagaimanakah partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Dengan telah ditetapkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini ingin mengetahui dan menganalisis tingkat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

I.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ialah:

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan berguna bagi penulis untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan serta pengalaman yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan ataupun juga selama mengadakan penelitian.
- b. Sebagai bahan masukan dan informasi serta bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut dalam aspek yang berhubungan.
- c. Memberikan gambaran bagi Pemerintah dan pihak terkait tentang faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

I. 4. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini sistematika penulisan akan meliputi lima bab yang masing-masing terdiri atas sub bab dengan kerangka sebagai berikut:

- a. Bab I : Merupakan bab pendahuluan yang mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.
- b. Bab II : Dalam bab ini dibicarakan tinjauan atau telaah pustaka yang memuat tentang pengertian-pengertian dasar objek penelitian dan hasil penelitian para peneliti terdahulu, hipotesis dan variabel penelitian
- c. Bab III : Membicarakan tentang metode penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data berdasarkan populasi dan sampel penelitian serta metode analisis data.
- d. Bab IV: Menguraikan tentang gambaran secara umum mengenai daerah penelitian.
- e. Bab V : Mengemukakan hasil penelitian dan pembahasan masalah.
- f. Bab VI: Merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

II. 1. Tinjauan Pustaka

II.1.1. Pengertian Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ‘partisipasi’ artinya ialah hal ikut serta dalam suatu kegiatan (Tim Prima Pena, 2008 : 584), dan ditinjau dari etimologi, kata partisipasi adalah merupakan padanan dari kata *participatie* (bahasa Belanda), atau *participation* (bahasa Inggris) yang berarti bagian atau ikut serta.

Menurut Seligman dan Edwin dalam Muhammad Al Amin (2003:9) menyatakan bahwa ‘pengertian partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh susunan kesatuan yang lebih besar’. Maka dari rumusan itu dapat dilihat bahwa partisipasi tersebut selalu dominan bahkan tidak dapat dipisahkan dalam segala kehidupan dalam kesatuan masyarakat ataupun kelompok masyarakat.

Kesatuan masyarakat ataupun kelompok masyarakat yang lebih besar dari suatu kehidupan berkelompok, dipimpin oleh suatu pemerintahan. Kelompok masyarakat tersebut dalam setiap kegiatan dan gerakannya tidak terlepas dari pantauan pimpinan atau pemerintahannya. Dengan kata lain pemerintahan memiliki peran dalam rangka memimpin suatu kelompok, dan anggota kelompok

tersebut yaitu warga masyarakatnya menerima peran dari pemerintah tersebut sebagai pihak yang berkewenangan untuk melakukan kontrol bagi setiap ke¹⁰ atau aktivitas maupun gerak yang dilakukan oleh warga masyarakatnya.

Sebagai wujud dari penerimaan peran dari pemerintahannya, masyarakat mewujudkannya dengan suatu sikap berupa partisipasi masyarakat dalam rencana dan program yang dicanangkan dan dibuat oleh pemerintah guna tujuan mencapai cita-cita demi kesejahteraan semua anggota atau warga masyarakat.

Partisipasi masyarakat berarti masyarakat ikut serta untuk mengikuti atau menyertai pemerintah karena kenyataannya pemerintah sebagai perancang, penyelenggara (berdasarkan *teori Contract Sosial*) memiliki wewenang mengatur dan pengatur utama warga negara demi kelancaran jalannya pembangunan.

II.1.2. Teori Partisipasi

Wahyudi Kumorotomo dalam Sondang P. Siagian (2005:136-138) menyatakan bahwa partisipasi warga negara dibedakan menjadi empat macam, yakni:

- a. Partisipasi dalam Pemilihan (*electoral participation*);
- b. Partisipasi Kelompok (*group participation*);
- c. Kontrak antara Warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contracting*); dan

d. Partisipasi Warga Negara secara langsung di lingkungan Pemerintahan.

Menurut Josef Riwu Kaho, (2002:111-112), bagi setiap negara yang demokratis (termasuk Indonesia), bagaimana pun akan melibatkan warganya dalam proses politik, hal ini setidaknya-tidaknya didasarkan pada pertimbangan, yaitu: *Pertama*, bila setuju bahwa aturan main politik yang memberikan kesempatan pada ‘yang diperintah’ yakni Warga Negara, untuk menentukan siapa ‘yang memerintah’ yakni Pemerintah dan untuk mempengaruhi tingkah lakunya dalam memerintah ialah aturan main yang menghormati harkat manusia, dan bila setuju bahwa penghormatan maupun peningkatan harkat manusia yaitu inti masalah kualitas manusia, maka pembahasan peran serta masyarakat cukup *gayuh*. *Kedua*, kenyataan bahwa setiap pemerintah - - dimana pun saja - - apapun corak idiologinya dan bagaimana pun otoriternya, tidak bisa mengabaikan begitu saja soal pemberian saluran bagi peran serta masyarakatnya.

Sementara itu, (Meriam Budiardjo dalam Josef Riwu Kaho, 2002:112) bahwa adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan ‘bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk menentukan

orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan untuk masa berikutnya’.

Secara umum jenis partisipasi yang ada dan tumbuh di dalam masyarakat dapat dilihat (Sastropoetro, 1998:43), seperti:

- a. Partisipasi dengan pikiran;
- b. Partisipasi dengan tenaga;
- c. Partisipasi dengan keahlian;
- d. Partisipasi dengan uang; dan
- e. Partisipasi dengan jasa-jasa.

a. Partisipasi dengan pikiran

Pikiran yaitu “hasil dari memikirkan; akal, ingatan; maksud, niat” (Tim Prima Pena 2007:611), maka dengan hal ikut serta dalam suatu kegiatan berupa hasil dari memikirkan, merupakan wujud dari partisipasi dengan pikiran. Sehingga dengan pikiran masyarakat mewujudkan sikap berupa keikutsertaannya dalam rencana dan program yang dicanangkan dan dibut oleh pemerintah guna tujuan mencapai cita-cita demi kesejahteraan semua anggota atau warga masyarakat..

b. Partisipasi dengan tenaga

Tenaga yaitu “kekuatan, daya yang dapat menggerakkan sesuatu, kegiatan bekerja atau berusaha” (Tim Prima Pena (2007:748), biasanya masyarakat menggunakan tenaga yang ada pada dirinya atau badannya sendiri berupa ikut bekerja

melakukan usaha mencapai sesuatu tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama, maka partisipasi dengan tenaga ialah ikut serta dalam suatu kegiatan, meluangkan waktu dan turut serta berusaha menggunakan kekuatan diri guna berusaha mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama.

c. Partisipasi dengan keahlian

Keahlian bersal dari kata 'ahli' yaitu "orang yang mempunyai ilmu khusus, mahir, pandai sekali, paham sekali tentang suatu disiplin negara", keahlian' yaitu kemahiran dalam suatu ilmu atau pekerjaan (Tim Prima Pena 2007:22) sehingga partisipasi dengan keahlian ialah ikut serta melakukan kegiatan dengan menggunakan kemahiran dalam suatu ilmu atau kepandaian guna mencapai tujuan yang diharapkan untuk kepentingan bersama.

d. Partisipasi dengan uang

Uang yaitu "alat pembayaran yang sah, alat pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah" (Tim Prim Pena 2007:780), maka partisipasi dengan uang ialah turut serta mencapai tujuan yang diaharapkan untuk kepentingan bersama dengan menggunakan alat pembayaran yang sah, atau alat pengukur nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah.

e. Partisipasi dengan jasa-jasa

Jasa yaitu “tindakan yang baik dan berguna bagi orang, kelompok masyarakat, bangsa dan negara” (Tim Prima Pena 2007:362), jasa-jasa ialah melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi orang atau kelompok masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara. Sehingga partisipasi dengan jasa-jasa ialah ikut serta dalam kegiatan dengan melakukan tindakan-tindakan yang berguna bagi orang atau kelompok masyarakat, maupun bagi bangsa dan negara.

Selain itu, ada faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam hal ini (Panggabean, 1998:15) yaitu:

- a. Tingkat pendidikan,
- b. Tingkat pendapatan,
- c. Jarak tempat tinggal,
- d. Sikap dan
- e. Penyuluhan yang diberikan.

II.1.3. Asumsi Partisipasi Masyarakat

Secara sederhana dapat diasumsikan bahwa partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan suatu program yang dilandasi dengan adanya pendidikan, penghasilan atau biaya yang dapat dibayar, jarak tempat tinggal yang semakin dekat atau waktu yang efisien, serta sikap atau perilaku yang baik maupun penyuluhan atau sosialisasi yang sering

dilakukan, dan administrasi birokrasi yang profesional, akan semakin meningkatkan partisipasi masyarakat.

II.2. Hipotesis

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan telaah pustaka di atas, maka dapat ditarik suatu hipotesis bahwa diduga partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terletak pada tingkat pendidikan, biaya, waktu, sikap atau perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi.

II.3. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penulis akan mengoperasionalkan konsep yang dikemukakan pada landasan teori-teori yang diungkapkan oleh para peneliti terdahulu yang terungkap dalam tinjauan pustaka yang meliputi:

1. Partisipasi adalah ikut sertanya suatu kesatuan untuk mengabil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh susunan kesatuan yang besar
2. Faktor - faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu :
 - a. Tingkat pendidikan

Konsep dasar dalam pendidikan ialah pendidikan lahir dari pergaulan antar orang dewasa dan orang yang belum dewasa

dalam suatu kehidupan. Tindakan mendidik yang dilakukan orang dewasa dengan sengaja didasari nilai-nilai kemanusiaan (Tanlain dalam Abu Ahmadi, 1991:64). Bahwa konsep pendidikan pada dasarnya tetap diarahkan pada tingkat kearah yang lebih baik dan dewasa yang didasari oleh nilai-nilai kemanusiaan.

Notoadmodjo dalam Abu Ahmadi (1991:73) menyatakan bahwa “pendidikan merupakan suatu proses pembinaan serta kemampuan mental seseorang kearah yang lebih baik dari sebelumnya”. Pengertian ini dapat ditarik suatu gambaran bahwa pendidikan itu adalah benar-benar suatu bekal untuk bertindak laku dalam kehidupan di masyarakat yang ditempuh baik dalam jalur pendidikan formal maupun dalam jalur pendidikan non formal. Pendidikan formal seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Umum (SLTA/ SLTU), Akademi, maupun Perguruan Tinggi. Pendidikan non formal seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, penataran, pergaulan masyarakat, perkumpulan dan kelompok-kelompok kegiatan.

b. Tingkat pendapatan

Hant dalam Jujun S. Sumantri (1987:79) menyatakan bahwa “selain faktor kelahiran, pendidikan dan pekerjaan, faktor tingkat penghasilan (pendapatan) merupakan determinan kelas

sosial dan sementara itu kelas sosial merupakan determinan dari gaya hidup seseorang”. Di dalam status sosial, peran uang atau harta sangat dominan, keterjangkauan dapat dipengaruhi oleh bentuk fasilitas sebagai pendukung yang penting di dalam gerak sehari-hari. Dalam hal ini tentu ketersediaan dana untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh karena pemakaian sejumlah fasilitas guna memenuhi kebutuhan yang harus dicapai.

c. Jarak tempat tinggal

Jarak antara tempat yang akan dituju dengan tempat dimana seseorang bertempat tinggal, relatif dapat menentukan minat dan motivasi seseorang untuk mencapainya. Semakin dekat tempat tujuan dari tempat tinggalnya, semakin gampang dan mudah untuk dicapai atau dijangkau dan akan semakin tidak merepotkan. Sehingga seseorang tidak merasa enggan mencapainya bila sewaktu-waktu memiliki keperluan di tempat tujuan itu sebaliknya bila jarak antara tempat tinggal dengan tempat yang akan dituju terlalu jauh, maka akan semakin sulit dan membuat enggan untuk mencapainya karena akan memakan waktu yang tidak sebentar, belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk terpenuhinya tujuan.

d. Sikap

Sikap merupakan perilaku. “Perilaku’ ialah tingkah atau perbuatan yang berkaitan dengan tanggapan seseorang terhadap

lingkungannya” (Tim Prima Pena 2007:603). Sehingga dengan sikap tertentu yang dibentuk dari tanggapan terhadap lingkungannya, relatif dapat menentukan seseorang untuk bersikap terhadap sesuatu keadaan, atau peristiwa maupun kejadian tertentu, dimana keadaan tersebut terjadi baik yang dapat melibatkan dirinya maupun tidak, secara langsung ataupun tidak langsung.

e. Penyuluhan yang diberikan

Penyuluhan berasal dari kata ‘suluh’ yang artinya obor atau alat penerang (Tim Prima Pena 2007:724), maka ‘penyuluhan’ ialah memberikan penerangan. Memberikan penerangan dalam hal ini berupa usaha untuk memberikan penjelasan dan kejelasan dari seseorang pribadi atau kelompok terhadap masyarakat umum bagi sesuatu hal tertentu. Hal tertentu itu dapat berupa suatu proses belajar seseorang anggota masyarakat untuk ikut serta mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dalam lingkungannya atau sosialisasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

III. 1. Lokasi dan Waktu Penelitian

III.1.1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah berada di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dengan alasan bahwa Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru merupakan daerah atau wilayah pemerintahan yang memiliki penduduk yang cukup besar, disamping itu juga merupakan wilayah atau daerah pemerintahan yang berkembang cukup pesat seiring perkembangan dari pembangunan daerah Kota Pekanbaru sendiri.

III.1.2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Maret hingga bulan Juni tahun 2009, sehingga memakan waktu selama empat bulan. Dalam masa itu harus telah dilakukan observasi dan pra penelitian serta penelitian dan laporan hasil penelitian.

III. 2. Jenis dan Sumber Data

III.2.1. Jenis Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini ialah data kualitatif, yaitu hal ini sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Lexy J. Moleong yang menyebutkan bahwa metode kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang

berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. (Lexy J. Maleong: 2000, 31).

III.2. 2. Sumber Data

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari lapangan secara langsung berdasarkan kuesioner dan observasi.

b. Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumen-dokumen yang berupa data yang diolah atau olahan dari objek penelitian.

III.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

- a. Observasi, yaitu dengan terjun langsung ke lapangan untuk dapat melihat keadaan nyata, sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- b. Kuisisioner, yaitu mengajukan pertanyaan dengan menyediakan pilihan jawaban yang telah disediakan warga masyarakat yang ada di wilayah Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
- c. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab kepada aparat pemerintah setempat tentang keadaan nyata yang dihadapi terkait tentang

partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan pengelolaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru..

III. 4. Populasi dan Sampel Penelitian

III.4.1. Populasi Penelitian

Populasi penelitian ini yaitu penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, sejumlah 29.924 orang.

III.4.2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut apabila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, waktu maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.

Metode pengambilan sampel yang penulis gunakan memakai cara *classified proporsional random sampling*, yaitu pengambilan sampel secara acak dengan metode *accidental* yaitu pada saat tertentu dimana terjadinya suatu kegiatan yang sifatnya sesaat saja dan tidak kontinu pada populasi yang dianggap homogen. (R. Santoso Murwani, 2001: 23). Untuk menentukan jumlah sampel dalam penelitian penulis menggunakan rumus Slovin karena pada populasi penelitian ini sangat banyak. Rumus Slovin tersebut adalah sebagai berikut .

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Ukuran sampel

N : Ukuran Populasi

e : Nilai kritis (batas ketelitian) yang diinginkan

Adapun jumlah populasi dari penelitian ini adalah 29.924 orang maka dengan besarnya jumlah tersebut dan demi menghemat biaya, tenaga, dan waktu maka penulis mengambil sampel dengan taraf kesalahan 10 %. Dari populasi yang berjumlah 29.924 orang didapat sampel sebanyak

$$n = \frac{29.924}{1 + 29.924 \times (10\%)^2}$$

$$n = \frac{29.924}{1 + 29.924 \times (0,1\%)^2}$$

$$n = \frac{29.924}{1 + 29.924 \times (0,01\%)^2}$$

$$n = \frac{29.924}{299,24}$$

$$n = 100$$

Jadi, dapat dikatakan bahwa jumlah sampel dari populasi 29.924 jiwa adalah sebanyak 100 orang.

III. 5. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan cara mengungkapkan hasil penelitian dengan mendeskripsikan secara deduktif deskriptif, yaitu berupa uraian yang menggambarkan keadaan sesungguhnya dari objek penelitian yaitu gambaran yang komprehensif tentang partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

III.1. Keadaan Geografis

Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya memiliki luas wilayah 1,111 Km² atau sekitar 0,1111 hektar. Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Siak;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Sail;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sail;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sail.

IV.2. Penduduk dan Mata Pencaharian

Penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya pada tahun 2009 sebanyak 30.453 jiwa yang terdiri 6.807 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan jumlah penduduk laki-laki yakni 15.108 orang dan perempuan sebanyak 15.345 orang.

Memiliki mata pencaharian utamanya sebagian besar bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Selain itu penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya juga bekerja sebagai pengusaha atau pedagang, PNS, TNI, Polri, buruh, dan lain-lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel IV. 1 Perincian Jumlah Penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Menujut Data Pencapaian Tahun 2009

No	Mata Pencapaian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	7.246	78,73
2	Pengusaha/Pedagang	1.171	12,72
3	PNS/TNI/Polri	332	3,60
4	Buruh	185	2,01
5	Lain-lain	269	2,92
	Jumlah	9.203	100,00

Sumber: Kantor Camat Tenayan Raya Tahun 2009.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya bekerja di sektor pertanian yakni sebanyak 7.246 orang (78,73 %). Kemudian sebagai pengusaha/pedagang menempati urutan kedua yakni sebanyak 1.171 orang (12,72 %), sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI dan Polri ada sebanyak 332 orang (3,60 %), kemudian ada juga yang bekerja sebagai buruh sebanyak 185 orang (2,01 %), dan pekerjaan lainnya sebanyak 269 orang (2,92 %).

IV 3. Tugas Pokok dan fungsi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Tugas pokok dan fungsi lurah berdasarkan Perda No 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan Dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

a. Pasal 35 bagian kesatu tentang susunan organisasi kelurahan terdiri dari :

1. Lurah;

- a. Sekretaris Kelurahan;
- b. Seksi Pemerintahan;
- c. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
- d. Seksi Pembangunan;
- e. Seksi Pelayanan Umum;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

2. Bagan susunan organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Pasal 36 bagian kedua tentang Kedudukan :

- 1. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan.
- 2. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada camat
- 3. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- 4. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

5. Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

c. Pasal 37 bagian ketiga tentang tugas pokok

1. Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota.
2. Pelimpahan urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan walikota

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah pada bab terdahulu yaitu pada Bab I, bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengembangkan berbagai inovasi penyempurnaan layanan publik, antara lain dengan mendirikan Dinas Perizinan sebagai institusi yang berdiri sendiri, sehingga dapat memberikan layanan yang lebih baik, efektif serta efisien, murah dan lebih cepat (martin@wartaegov.com). Termasuk beberapa inovasi yang diarahkan untuk mencegah tindakan yang mengarah korupsi dan melakukan beberapa pungutan tidak resmi dalam layanan pengurusan Kartu Tanda Penduduk atau KTP. Layanan pengurusan KTP dipilih terutama didasari kepentingan untuk mengetahui efektivitas pengembangan layanan dan implementasi program pembaruan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Penyempurnaan layanan pengurusan KTP di Kota Pekanbaru, meskipun sudah mendapatkan pujian dan penghargaan, dianggap masih membutuhkan masukan dan penilaian dari warga pengguna jasa tersebut.

Namun, untuk keseimbangan serta dalam mendukung program tersebut, banyak dilakukan razia *yustisi* terhadap warga masyarakat di beberapa tempat di wilayah Kota Pekanbaru. (www.metrورياu.com) Tujuannya agar menertibkan warga masyarakat baik yang sudah tinggal lama maupun yang datang baru ke Kota Pekanbaru, disamping juga untuk mendata warga masyarakat yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Pemerintah untuk program tersebut, memang sebaiknya didukung oleh adanya partisipasi masyarakat yang berkesadaran sendiri untuk berusaha dalam kepemilikan dan melakukan kepengurusan KTP, dan bukannya diadakan pemaksaan dengan mengadakan razia, toh intinya, untuk mendapatkan KTP harus dilengkapi persyaratan dengan dokumen surat pindah (www.riaumandiri.net). Ini berlaku bagi seluruh warga tanpa kecuali. Hanya saja, bagi anggota TNI/Polri, PNS, BUMN dan BUMD, tidak diberlakukan uang jaminan, kartu izin sementara (KIS) dan kartu izin menetap (KIM) serta tidak harus menunggu satu tahun.

Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan terhadap partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka di tingkat kelurahan khususnya terhadap Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, semenjak diberlakukan sistem baru yang ditangani oleh Disdukcapil, partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak terdapat catatan secara pasti dan jelas, artinya pada Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru belum tersedia adanya informasi yang jelas tentang partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.

Untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, maka penulis melakukan kegiatan penelitian dengan cara mengadakan observasi dan menyebarkan kuesioner serta melakukan wawancara.

V. 1. Hasil Observasi

Dalam melakukan penelitian dengan observasi mengenai kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, penulis mengunjungi lokasi penelitian yaitu ke kantor Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru yang dilakukan mulai tanggal 23 Juni 2009, penulis ingin melihat langsung data yang dimiliki oleh Kelurahan Rejosari tersebut terkait mengenai warga yang memiliki dan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Dari hasil observasi tersebut, penulis tidak menemukan data jumlah penduduk yang telah memiliki KTP dan juga jumlah penduduk yang mengurus KTP, sehingga tidak ada terdata dengan jelas kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di kantor Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya tersebut. Hal itu dikarenakan sistem pencatatan masih belum dilakukan secara sungguh-sungguh dan belum dilakukan penabulasian data atas banyak masyarakat yang meminta surat pengantar atau minta pengesahan guna ditandatangani oleh lurah setempat.

Justru khusus masalah pengurusan KTP, penulis menemukan adanya keluhan masyarakat yang juga telah disampaikan kepada anggota dewan daerah pemilihan di Kota Pekanbaru tentang pelayanan pembuatan KTP yang menilainya masih buruk. Kendati Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru telah memusatkan pengurusannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

V. 2. Hasil Kuesioner

Untuk menyajikan hasil kuesioner yang didapat dari penelitian yang dilakukan, maka penulis sebelumnya perlu untuk memaparkan cara dan pelaksanaan pengambilan data dengan kuesioner sebagaimana hal berikut. Bahwa kuesioner berfungsi guna mengambil data yang dapat memperlihatkan penggambaran terhadap enam faktor dimaksud. Enam faktor tersebut ialah yang telah dirumuskan di dalam kajian landasan teori pada bab II, yaitu:

1. Tingkat Pendidikan;
2. Biaya;
3. Waktu;
4. Perilaku Pegawai;
5. Sosialisasi;
6. Administrasi Birokrasi.

Di setiap faktor tersebut, dikonstruksikan adanya pernyataan yang terdiri atas 5 (lima) pernyataan untuk setiap masing-masing faktor yang akan dianalisa, yang akan diketahui hasilnya dengan adanya jawaban dari responden penelitian, dengan diajukan pernyataan itu untuk ditanggapi. Pernyataan yang diajukan tersebut, merupakan pernyataan yang berbentuk pernyataan “positif”, artinya pernyataan tersebut menggambarkan keberpihakan kepada kondisi yang “ideal” atau keadaan yang seharusnya dan yang diinginkan.

Adapun pernyataan masing-masing kuesioner untuk menggambarkan keadaan atas enam faktor yang akan diteliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk Tingkat Pendidikan, yaitu dengan pernyataan:
 - a) Dalam mengurus KTP tidak dibedakan tingkat pendidikannya.
 - b) Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi terhadap kepemilikan KTP anda.
 - c) Mengurus KTP karena pendidikan anda.
 - d) Anda mengurus KTP untuk keperluan pendidikan.
 - e) KTP tidak perlu mencantumkan pendidikan.
2. Biaya, yaitu dengan pernyataan:
 - a) Untuk mendapatkan KTP sangat mudah dan dengan biaya ringan.
 - b) Selalu ada biaya cukup untuk membayar pembuatan KTP.
 - c) Pengurusan KTP tidak dikenakan biaya tambahan.
 - d) Tidak ada kenaikan biaya dalam mengurus KTP tiap tahunnya.
 - e) Masyarakat telah mengetahui biaya resmi dalam pembuatan KTP.
3. Waktu, yaitu dengan pernyataan:
 - a) Dalam mengurus KTP waktu yang diperlukan tidak lama.
 - b) KTP siap sesuai waktu yang ditentukan.
 - c) Untuk menempuh / mencapai tempat pengurusan KTP tidak makan waktu lama.

- d) Jangka waktu berlakunya KTP sesuai ketentuan.
- e) Untuk mengurus KTP ada waktu-waktu tertentu.

4. Perilaku Pegawai Kelurahan Rejosari, yaitu dengan pernyataan:

- a) Para pegawai telah disiplin dalam bekerja.
- b) Kerjasama para pegawai sangat baik.
- c) Tidak ada pegawai yang nakal.
- d) Pegawai ramah melayani masyarakat.
- e) Pegawai cepat bertindak dalam segala urusan.

5. Sosialisasi, yaitu dengan pernyataan:

- a) Telah dilakukan sosialisasi dengan baik.
- b) Sosialisasi yang diberikan sudah cukup sering.
- c) Masyarakat paham dengan apa yang disampaikan pada saat sosialisasi.
- d) Sosialisasi diberikan langsung oleh pejabat terkait; Pemko Pekanbaru.
- e) Masyarakat antusias mengikuti sosialisasi.

6. Administrasi Birokrasi, yaitu dengan pernyataan:

- a) Administrasi birokrasi yang ada di Pemerintahan sekarang sudah cukup baik.
- b) Pelayanan yang diberikan dalam kepengurusan KTP sudah sesuai dengan standar mutu.
- c) Tidak perlu lagi ada penambahan fasilitas pelayanan.

d) Administrasinya telah dengan baik dilakukan guna melayani masyarakat.

e) Peralatan pembuatan KTP sudah cukup lengkap.

Pernyataan-pernyataan di atas itu perlu ditanggapi oleh responden penelitian ini dengan memilih jawaban tanggapan yang telah disediakan yaitu ada 5 (lima) pilihan jawaban tanggapan yang menjadi indikator dalam penelitian, yaitu berupa jawaban :

1. SS = Keterangan atas jawaban "Sangat Setuju",
2. S = Keterangan atas jawaban "Setuju",
3. RR = Keterangan atas jawaban "Ragu-Ragu"
4. TS = Keterangan atas jawaban "Tidak Setuju", dan
5. STS = Keterangan atas jawaban "Sangat Tidak Setuju".

Lima pilihan jawaban tersebut merupakan pilihan jawaban yang menggambarkan kecenderungan masyarakat menilai keberpihakannya terhadap pertanyaan "positif" tersebut.

Semakin banyak sejumlah responden penelitian banyak memilih jawaban 'Sangat Setuju' dan 'Setuju', berarti masyarakat menilai pertanyaan itu telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau "ideal". Akan tetapi, semakin sejumlah responden penelitian banyak memilih jawaban 'Tidak Setuju' dan 'Sangat Tidak Setuju', berarti masyarakat menilai pertanyaan yang ada itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau tidak "ideal".

Akan tetapi, bila sejumlah responden penelitian tersebut menanggapi dengan pilihan jawaban 'Ragu-Ragu', berarti masyarakat menilai bahwa pernyataan itu tidak diketahui pasti berlaku ataukah tidak berlaku pada keadaan sebenarnya yang terjadi, sehingga masyarakat yang merupakan responden pada penelitian ini menganggap bahwa mereka telah mengalami kebimbangan terhadap kecenderungan penilaian mendekati "ideal" ataukah tidak terhadap keadaan sebenarnya.

Dalam melakukan penelitian dengan cara kuesioner tersebut, maka dilakukan penghitungan hasil penelitian (*tally*) hasil yang diperoleh dapat disajikan dan diinformasikan data tersebut dengan tabel sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan

Tabel V. 1 : Tingkat Pendidikan Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		46	22	11	11	10	100
2		42	22	13	13	10	100
3		14	17	25	25	19	100
4		12	17	15	37	19	100
5		22	26	15	21	16	100
	Jumlah	136	104	79	107	74	500
	Persentase	27,2 %	20,8 %	15,8 %	21,4 %	14,8 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari tabel V. 1 di atas, dapat dilihat dan dapat menggambarkan adanya kecenderungan pilihan jawaban masyarakat yang menanggapi sebagai responden penelitian ini untuk menilai “ideal” tidaknya ukuran pertanyaan itu sesuai dengan kenyataan keadaan sebenarnya. Bahwa terhadap pernyataan nomor 1, responden sebanyak 100 orang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 46, dan ‘Setuju’ sebanyak 22, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 11, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 11 dari, serta jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ tidak dipilih oleh responden penelitian ini. Untuk jawaban pernyataan nomor 2 juga sebagaimana pula jawaban pada nomor 1, responden yang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 42, lalu ‘Setuju’ sebanyak 22, dan ‘Ragu-Ragu’ serta ‘Tidak Setuju’ masing-masing sebanyak 13. berikut untuk pernyataan nomor 3 terlihat jawaban untuk ‘Sangat Setuju’ sebanyak 14, ‘Setuju’ sebanyak 17, ‘Ragu-Ragu’ dan ‘Tidak Setuju’ masing-masing sebanyak 25, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 19. Untuk jawaban pernyataan nomor 4 terlihat jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 12, yang menjawab ‘Setuju’ sebanyak 17, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 15, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 37, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 19. Untuk pernyataan nomor 5, responden penelitian menjawab untuk ‘Sangat Setuju’ sebanyak 22, ‘Setuju’ sebanyak 26, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 15, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 21, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 16. Sehingga bila dijumlah atau ditotal untuk keseluruhan jawaban pertanyaan itu, untuk yang ‘Sangat Setuju’ berjumlah 136, untuk yang ‘Setuju’ berjumlah 104,

untuk yang ‘Ragu-Ragu’ berjumlah 79, untuk yang ‘Tidak Setuju’ 107, dan untuk yang Sangat ‘Tidak Setuju’ atau ‘STS’

Bila dipersentasekan angka-angka tersebut di atas, terdapat angka tertinggi sebesar 27,2 % pada jawaban ‘Sangat Setuju’, disusul jawaban “Tidak Setuju” sebesar 21,4 %, berikut sebesar 20,8 % pada jawaban “Setuju”, lalu sebesar 15,8 % pada jawaban ‘Ragu-ragu’, dan 14,8 % pada jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’.

Dari persentase tersebut dapat memperlihatkan kecenderungan terhadap faktorl tingkat pendidikan yang menunjukkan keadaan dengan 27,2 % terhadap jawaban “Sangat Setuju”, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran pertanyaan pada kuesioner tersebut sesuai dengan keadaan nyata. Artinya dengan banyaknya responden yang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’, maka pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dalam penelitian ini dapat dikatakan ideal untuk mengukur kesesuaian faktor tingkat pendidikan dengan keadaan nyata.

2. Biaya

Tabel V. 2 : Biaya Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatanantenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		17	20	29	19	15	100
2		16	30	26	15	13	100

3		23	16	30	15	16	100
4		16	21	28	21	14	100
5		25	19	16	24	16	100
	Jumlah	97	106	129	94	74	500
	Persentase	19,4 %	21,2 %	25,8 %	19 %	14,8 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tampak pada tabel V. 2 di atas, diketahui untuk pernyataan nomor 1 dijawab dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 17, ‘Setuju’ sebanyak 20, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 29, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 19, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 15. Untuk pernyataan nomor 2 dijawab dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 16, ‘Setuju’ sebanyak 30, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 26, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 15, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 13. Untuk pernyataan nomor 3 dijawab dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 23, ‘S’ sebanyak 16, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 30, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 15, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 16. Selanjutnya, untuk pernyataan nomor 4 dijawab dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 16, ‘Setuju’ sebanyak 21, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 28, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 21, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 14. Lalu, untuk pernyataan nomor 5 dijawab dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 25, ‘Setuju’ sebanyak 19, ‘Ragu-Ragu’ sebanyak 16, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 24, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 16. Maka bila dijumlahkan, untuk ‘Sangat Setuju’ berjumlah 97, ‘Setuju’ berjumlah 106,

‘Ragu-Ragu’ berjumlah 129, dan ‘Tidak Setuju’ berjumlah 94, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ berjumlah 74.

Dapat dilihat dari angka persentase tertinggi pada tabel tersebut di atas, terdapat pada jawaban pernyataan dengan jawaban ‘Ragu-Ragu’ berjumlah 25,8 %. Lalu jawaban ‘Setuju’ berjumlah 21,2 %, disusul jawaban ‘Sangat Setuju’ berjumlah 19,4 %, dan jawaban ‘Tidak Setuju’ berjumlah 19 % serta jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ berjumlah 14,8 %.

Dari angka persentase tersebut menunjukkan adanya kecenderungan kepada kondisi yang sesuai pertanyaan kuesioner dengan keadaan nyata atau sebenarnya dengan jawaban responden yang lebih banyak memilih ‘Ragu-Ragu’, maka keadaan masyarakat terkait terhadap faktor biaya dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan, telah mengalami kebimbangan terhadap kecenderungan penilaian mendekati ”ideal” atautkah tidak terhadap keadaan yang sebenarnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk variabel biaya dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, masyarakat masih belum dapat menentukan ukuran biaya yang ideal dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu

Tanda Penduduk (KTP) relatif tidak dapat dinilai sebagai ukuran bagi masyarakat dalam rangka kepemilikan dan kepengurusan KTP.

3. Waktu

Tabel V. 3 : Waktu Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		16	19	25	19	21	100
2		21	19	23	18	19	100
3		19	24	15	20	22	100
4		26	39	10	11	14	100
5		12	16	19	33	20	100
	Jumlah	94	117	92	101	96	500
	Persentase	18,8 %	23,4 %	18,4 %	20,2 %	19,2 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari tabel V. 3 di atas, dapat dilihat dan dapat menggambarkan adanya kecenderungan pilihan jawaban masyarakat sebagai responden penelitian ini untuk menilai “ideal” tidaknya ukuran pertanyaan itu sesuai dengan kenyataan keadaan sebenarnya. Bahwa terhadap

pernyataan nomor 1, responden memilih jawaban 'Sangat Setuju' sebanyak 16 dari jumlah responden sebanyak 100 orang, dan 'Setuju' sebanyak 19, 'Ragu-Ragu' sebanyak 25, dan 'Tidak Setuju' sebanyak 19, serta jawaban 'Sangat Tidak Setuju' ada 21 dari jumlah responden penelitian ini. Untuk jawaban pernyataan nomor 2, responden yang memilih jawaban 'Sangat Setuju' sebanyak 21, lalu 'Setuju' sebanyak 19, 'Ragu-Ragu' 23, 'Tidak Setuju' sebanyak 18 dan 'Setuju Tidak Setuju' sebanyak 19. Berikut untuk pernyataan nomor 3 terlihat jawaban untuk 'Sangat Setuju' sebanyak 19, 'Setuju' sebanyak 24, 'Ragu-Ragu' sebanyak 15, 'Tidak Setuju' sebanyak 20, serta 'Sangat Tidak Setuju' sebanyak 22. Untuk jawaban pernyataan nomor 4 terlihat jawaban 'Sangat Setuju' sebanyak 26, yang menjawab 'Setuju' sebanyak 39, 'Ragu-Ragu' tidak ada, 'Tidak Setuju' sebanyak 11, dan 'Sangat Tidak Setuju' sebanyak 14. Untuk pernyataan nomor 5, responden penelitian menjawab untuk 'Sangat Setuju' sebanyak 12, 'Setuju' sebanyak 16, 'Ragu-Ragu' sebanyak 19, 'Tidak Setuju' sebanyak 33, dan 'Sangat Tidak Setuju' sebanyak 20. Sehingga bila dijumlah atau ditotal untuk keseluruhan jawaban pernyataan itu, untuk yang 'Sangat Setuju' berjumlah 54, untuk yang 'Setuju' berjumlah 77, untuk yang Ragu-Ragu berjumlah 52, untuk yang 'Tidak Setuju' berjumlah 61, dan untuk yang sangat tidak setuju atau 'Sangat Tidak Setuju' berjumlah 56.

Bila dipersentasekan angka-angka tersebut di atas, terdapat angka tertinggi sebesar 23,4 % pada jawaban 'Setuju' , disusul jawaban

‘Tidak Setuju’ sebesar 20,2 %, berikut sebesar 19,2 % pada jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’, lalu sebesar 18,8 % pada jawaban ‘Sangat Setuju’, dan 18,4 % pada jawaban ‘Ragu-ragu’.

Persentase perolehan data berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan jawaban terbanyak adalah setuju, maka terhadap ketentuan waktu untuk partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dinilai oleh masyarakat sebagai kenyataan yang telah sesuai dengan yang sebenarnya. Artinya, waktu sebagai variabel yang telah dijadikan ukuran ideal bagi kepemilikan dan kepengurusan KTP telah sesuai dengan ketentuan yang ada dan diterima oleh masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP.

4. Perilaku Pegawai

Tabel V. 4 : Perilaku Pegawai Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		16	26	25	22	11	100
2		16	23	26	25	10	100
3		16	16	30	26	12	100
4		25	29	21	14	11	100
5		21	13	32	22	12	100

	Jumlah	94	107	134	109	56	500
	Persentase	18,8 %	21,4 %	26,6 %	21,6 %	11,2 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Tabel V. 4 di atas, terlihat responden memilih jawaban nomor 1 dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 16 dari jumlah responden sebanyak 100 orang, dan ‘Setuju’ sebanyak 26, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 25, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 22, serta jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ ada 11 dari jumlah responden penelitian ini. Untuk jawaban pernyataan nomor 2, responden yang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 16, lalu ‘Setuju’ sebanyak 23, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 26, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 25 dan ‘Sangat Tidak Setuju’ tidak ada. Berikut untuk pernyataan nomor 3 terlihat jawaban untuk ‘Sangat Setuju’ dan ‘Setuju’ sebanyak 16, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 30, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 26, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 12. Untuk jawaban pernyataan nomor 4 terlihat jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 25, yang menjawab ‘Setuju’ sebanyak 29, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 21, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 14, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ 11. Untuk pernyataan nomor 5, responden penelitian menjawab untuk ‘Sangat Setuju’ sebanyak 21, ‘Setuju’ sebanyak 13, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 32, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 22, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 12. Sehingga bila dijumlah atau ditotal untuk keseluruhan jawaban pertanyaan itu, untuk yang ‘Sangat Setuju’ berjumlah 94, untuk yang ‘Setuju’ berjumlah 107, untuk yang ‘Ragu -

Ragu' berjumlah 134, untuk yang 'Tidak Setuju' berjumlah 109, dan untuk yang 'Sangat Tidak Setuju' berjumlah 56. Bila dipersentasekan angka-angka tersebut di atas, sebesar 18,8 % pada jawaban 'Sangat Setuju', sebesar 21,4 % pada jawaban 'Setuju', 26,6 % pada jawaban 'Ragu - Ragu, kemudian 21,6 % jawaban 'Tidak Setuju' sebesar , terakhir 11,2 % pada jawaban 'Sangat Tidak Setuju.

Dari keadaan persentase itu, jawaban yang terbanyak atau tertinggi persentasenya untuk penilaian perilaku pegawai dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, ialah pada jawaban 'Ragu - Ragu' sebesar 26,6 %. Hal ini dapat menunjukkan bahwa perilaku pegawai dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, dinilai oleh masyarakat masih belum ideal walau juga tidak buruk atau tidak baik.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perilaku pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, belum sesuai dengan yang diharapkan, akan tetapi juga tidak sangat buruk perilakunya.

5. Sosialisasi

Tabel V. 5 : Sosialisasi Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		12	15	20	25	28	100
2		11	14	19	26	30	100
3		11	11	24	26	28	100
4		15	13	21	26	25	100
5		14	14	29	20	23	100
	Jumlah	63	67	113	123	134	500
	Persentase	12,6 %	13,4 %	22,6 %	24,6 %	26,8 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pernyataan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Dari tampilan tabel V. 5 di atas, terlihat responden memilih jawaban nomor 1 dengan ‘Sangat Setuju’ sebanyak 12 dengan jumlah responden sebanyak 100 orang, dan ‘Setuju’ sebanyak 15, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 20, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 25, serta jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ ada 28. Untuk jawaban nomor 2, responden yang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 11, lalu ‘Setuju’ sebanyak 14, ‘Ragu – Ragu’ sebanyak 19, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 26 dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 30. Berikut untuk tanggapan nomor 3 terlihat jawaban untuk ‘Sangat Setuju’ dan ‘Setuju’ sebanyak 11, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 24, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 26, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 28. Untuk jawaban nomor 4 terlihat jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 15, yang menjawab

‘Setuju’ sebanyak 13, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 21, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 26, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ 25. Untuk tanggapan nomor 5, responden penelitian menjawab untuk ‘Sangat Setuju’ dan ‘Setuju’ sebanyak 14, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 29, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 20, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 23. Maka bila dijumlah atau ditotal untuk keseluruhan jawaban pernyataan itu, untuk yang ‘Sangat Setuju’ berjumlah 23, untuk yang ‘Setuju’ berjumlah 27, untuk yang ‘Ragu - Ragu’ berjumlah 73, untuk yang ‘Tidak Setuju’ berjumlah 83, dan untuk yang ‘Sangat Tidak Setuju’ berjumlah 94.

Bila dipersentasekan angka-angka tersebut di atas, sebesar 12,6 % pada jawaban ‘Sangat Setuju’ sebesar 13,4 % pada jawaban ‘Setuju’, 22,6 % pada jawaban ‘Ragu - Ragu’, kemudian sebesar 24,6 % jawaban ‘Tidak Setuju’, terakhir 26,8 % pada jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’.

Dari angka persentase tersebut terlihat persentase tertinggi ialah pada jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ sebesar 26,8 %, hal itu dapat menunjukkan bahwa sosialisasi dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan

Tenayan Raya Kota Pekanbaru tidak mencapai ukuran ideal, artinya apa yang diharapkan kepada aparat terkait untuk menyosialisasikan kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak terlaksana dengan baik.

Dengan sosialisasi yang tidak terlaksana dengan baik tersebut, maka bagaimana mungkin masyarakat dapat diharapkan untuk

berpartisipasi dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan tidak akan mungkin pemerintah dapat mencapai keinginannya untuk setiap penduduk atau masyarakat memiliki serta mengurus Kartu Tanda Penduduk.

6. Administrasi Birokrasi

Tabel V. 6 ; Administrasi Birokrasi Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

No	Pernyataan	Tanggapan					Jumlah Responden
		SS	S	RR	TS	STS	
1		11	19	34	25	11	100
2		10	16	37	27	10	100
3		10	20	19	33	18	100
4		18	21	27	21	13	100
5		19	20	23	25	13	100
	Jumlah	68	96	140	131	65	500
	Persentase	13,6 %	19,2 %	28 %	26,2 %	13 %	100 %

Sumber: Data Olahan 2009.

Keterangan: Daftar Pertanyaan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Terlihat pada tabel V. 6 di atas, memperlihatkan untuk pernyataan nomor 1 dengan jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 11 dari jumlah responden sebanyak 100 orang, dan ‘Setuju’ sebanyak 19, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 34, dan ‘Tidak Setuju’ sebanyak 25, serta jawaban ‘Sangat Tidak Setuju’ ada 11. Untuk jawaban pernyataan nomor 2, responden yang memilih jawaban ‘Sangat Setuju’ tidak ada, lalu ‘Setuju’ sebanyak 16, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 37, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 27 dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 10. Berikut untuk pernyataan nomor 3 terlihat jawaban untuk ‘Sangat Setuju’ juga tidak ada, ‘Setuju’ sebanyak 20, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 19, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 33, serta ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 18. Untuk jawaban pernyataan nomor 4 terlihat jawaban ‘Sangat Setuju’ sebanyak 18, yang menjawab ‘Setuju’ sebanyak 21, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 27, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 21, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ 13. Untuk pernyataan nomor 5, responden penelitian menjawab untuk ‘Sangat Setuju’ sebanyak 19, ‘Setuju’ sebanyak 20, ‘Ragu - Ragu’ sebanyak 23, ‘Tidak Setuju’ sebanyak 25, dan ‘Sangat Tidak Setuju’ sebanyak 13. Lalu jika dijumlah atau ditotal untuk keseluruhan jawaban pernyataan itu, maka untuk yang ‘Sangat Setuju’ berjumlah 28, untuk yang ‘Setuju’ berjumlah 56, untuk yang ‘Ragu - Ragu’ berjumlah 95, untuk yang ‘Tidak Setuju’ berjumlah 91, dan untuk yang ‘Sangat Tidak Setuju’ berjumlah 30.

Terlihat pada persentase angka-angka tersebut di atas, maka sebesar 13,6 % pada jawaban 'Sangat Setuju', sebesar 19,2 % pada jawaban 'Setuju', 28 % pada jawaban 'Ragu - Ragu', kemudian 26,2 % jawaban 'Tidak Setuju' , terakhir hanya 13 % pada jawaban 'Sangat Tidak Setuju'.

Dari angka persentase tersebut terlihat sebesar 28 % pada jawaban 'Ragu - Ragu' yang merupakan angka persentase tertinggi. Artinya kecenderungan jawaban masyarakat atas Administrasi Birokrasi dalam kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru menunjukkan telah mengalami kebimbangan terhadap kecenderungan penilaian mendekati ideal dan ataukah tidak ideal terhadap keadaan sebenarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi birokrasi bagi partisipasi masyarakat terhadap pelayanan atas kepemilikan dan pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih belum ideal, namun juga tidak buruk.

V. 3. Hasil Wawancara

Berkaitan dengan hasil kuesioner di atas, maka untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan kuesioner dari penelitian ini, penulis mengadakan wawancara kepada aparat pemerintah setempat yaitu Lurah Rejosari sebagai orang yang terlibat langsung dalam kepemilikan dan

kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

Wawancara tersebut dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana biaya yang dikenakan terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana waktu yang disediakan terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
4. Bagaimana perilaku pegawai terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
5. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
6. Bagaimana administrasi birokrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?

Dari pertanyaan tersebut, Lurah Rejosari Faisal Hendry (wawancara dilakukan dalam bulan September 2009) menjawab sebagaimana berikut:

Pertama, bahwa tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat yang melakukan kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk, masyarakat dalam mengurus KTP tidak dibedakan tingkat pendidikannya. Artinya, apapun latar belakang pendidikannya, tidak menjadikan seseorang berbeda dalam kepengurusan KTP; begitu pula bahwa tingkat pendidikan tidak mempengaruhi terhadap kepemilikan KTP, yang artinya ialah kepemilikan KTP tidak memandang tingkat pendidikan seseorang, kalau telah mencapai umur yang telah ditentukan, maka mereka perlu memiliki KTP; berikut mengurus KTP tidak karena pendidikan, andai ada yang mengurus KTP untuk keperluan pendidikan, itu sifatnya pribadi yang oleh karena beberapa lembaga pendidikan menyaratkan adanya KTP untuk pendaftaran, dan KTP merupakan identitas diri seseorang yang juga tidak mengenal adanya diskriminasi karena tingkat pendidikan seseorang, makanya di dalam KTP tidak perlu mencantumkan pendidikan seseorang.

Kedua, bahwa biaya yang dikenakan terhadap masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP ialah biaya yang mampu untuk dipikul oleh masyarakat, biasanya untuk mendapatkan KTP sangat mudah dan dengan biaya ringan, masyarakat dijamin selalu ada biaya cukup untuk membayar pembuatan KTP, namun bila masyarakat mewakilkan kepengurusannya kepada orang lain atau melalui calo tentu relatif orang itu akan dikenai biaya tambahan untuk membayar calo tersebut, pada hal bila mengurus sendiri tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar. Untuk kenaikan biaya dalam mengurus KTP ditiap-tahunnya, ini relatif

dan biasanya masyarakat telah mengetahui biaya resmi dalam pembuatan KTP.

Ketiga, bahwa yang dimaksud dengan waktu yang disediakan terhadap kepemilikan dan kepengurusan KTP ialah untuk kepemilikan KTP memiliki masa berlaku, misalnya selama 5 (lima) tahun dan untuk itu harus diperpanjang lagi, sedangkan untuk kepengurusannya waktu yang diperlukan tidak lama, bergantung kepada sipengurus itu sendiri. Biasanya KTP siap sesuai waktu yang ditentukan. Untuk menempuh atau mencapai tempat pengurusan KTP relatif sesuai jarak yang ditempuh oleh seseorang yang mau mengurus KTP itu, semakin dekat tempat tinggalnya dengan tempat pengurusan KTP tentu tidak memakan waktu lama, akan tetapi bila jarak tempat tinggal jauh untuk ditempuh tentu waktu yang diperlukan juga tidak sedikit. Pemerintah berusaha untuk disiplin dalam memberlakukan jangka waktu berlakunya KTP sesuai ketentuan, dan untuk mengurus KTP biasanya tidak ada waktu-waktu tertentu, kecuali kantor dalam keadaan istirahat atau hari libur, cuma masyarakat saja yang memiliki hari tertentu untuk mengurus KTP, misalnya pada saat ada imbauan pemerintah atau pemerintah memberlakukan persyaratan dalam mengurus keperluan yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan yang memerlukan syarat adanya KTP.

Keempat, bahwa perilaku pegawai kelurahan dalam melakukan pelayanan terhadap kepemilikan dan kepengurusan KTP adalah para pegawai harus disiplin dalam bekerja, artinya para pegawai mematuhi

segala ketentuan yang telah ada untuk dilaksanakan dalam melayani kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk tersebut, bagi yang telah melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dirinya tidak berdisiplin dan tidak mematuhi peraturan. Untuk menunjang keberhasilan pelayanan, maka para pegawai perlu melakukan kerjasama yang saling bersinergi satu sama lainnya. Hal tersebut juga ditujukan untuk menekan adanya para pegawai yang nakal, yaitu pegawai yang melakukan tindakan di luar dari ketentuan yang digariskan. Para pegawai diwajibkan bersikap ramah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan cepat bertindak dalam segala urusan yang dalam hal ini masih terkait pada urusan kepemilikan dan kepengurusan KTP, namun tentu perilaku pegawai tersebut baik atau tidaknya akan dirasakan oleh masyarakat dan akan pula masyarakat yang menilainya.

Kelima, bahwa sosialisasi yang dilakukan dalam rangka kepemilikan dan kepengurusan KTP itu telah dilakukan lewat media elektronik dan media massa. Pelaksanaan sosialisasi sangat bergantung pada dua segi yaitu dari segi pemerintah sendiri sebagai penyedia pelayanan dan dari segi masyarakat sendiri sebagai pihak yang dilayani. Baik-buruknya usaha yang dilakukan dalam rangka sosialisasi guna pemberitahuan kepada masyarakat juga akan dirasakan oleh masyarakat tersebut, dan efeknya tentu akan muncul adanya usaha masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP itu. Sosialisasi yang diberikan pun sudah cukup sering, namun itu tidak menjamin partisipasi masyarakat

signifikan dengan usaha sosialisasi, hal itu dipicu dengan adanya tingkat pemahaman masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan pada saat sosialisasi itu. Di samping itu, sosialisasi yang diberikan langsung oleh pejabat terkait dilakukan pada saat-saat tertentu saja, hal ini disebabkan anggaran untuk sosialisasi yang tidak sedikit dan tidak sebanding dengan kecukupan dana yang ada untuk sosialisasi, sehingga mengakibatkan sosialisasi dari pejabat terkait tersebut sangat temporer sifatnya. Sedangkan masyarakat yang mengikuti sosialisasi sangat tergantung juga dengan kesempatan dan kemauan masyarakat itu sendiri, hal itu karena masyarakat memiliki kegiatannya masing-masing yang tidak dapat dipaksakan untuk mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh aparat yang terkait.

Keenam, bahwa dari sudut administrasi birokrasi terhadap partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP, maka administrasi birokrasi yang ada di pemerintahan desa khususnya diusahakan untuk dapat sebaik mungkin dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu sistem pemerintahan yang teratur, artinya dengan adanya administrasi birokrasi tersebut, masyarakat yang melakukan kepemilikan dan kepengurusan KTP bertambah tertib lagi dan bagi pemerintah sendiri dapat mempermudah tata kerja serta efisiensi fungsi-fungsi pelayanannya. Diharapkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah lewat administrasi birokrasinya dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP sudah sesuai dengan standar mutu, sehingga tidak perlu lagi ada penambahan fasilitas pelayanan, di samping

itu juga dengan peralatan pembuatan KTP yang sudah cukup lengkap diharapkan administrasinya semakin baik untuk dilakukan guna melayani masyarakat dan partisipasi masyarakat akan lebih meningkat lagi.

Demikian keseluruhan hasil wawancara yang penulis adakan disela-sela kesibukan kerja Lurah Rejosari di kantornya.

Dari uraian hasil wawancara tersebut di atas, menggambarkan bahwa dari sudut pemerintah desa khususnya Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sendiri dalam melihat partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, terdapat perbedaan yang signifikan jika dibandingkan dan disandingkan dengan hasil observasi serta hasil kuesioner.

Dapat dianalisis bahwa dengan didasarkan dari observasi yang dilakukan, bahwa tidak terdapat data yang pasti jumlah penduduk atau masyarakat yang memiliki KTP serta tidak ada data yang pasti berapa jumlah penduduk atau masyarakat yang mengurus KTP di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya tersebut. Di samping itu, bila dianalisis dengan didasarkan dari hasil kuesioner yang merupakan akumulasi penilaian masyarakat, maka hasil wawancara tersebut juga terdapat adanya beberapa hal-hal yang sinkron dan juga ada yang tidak sinkron atau masih kontroversi dengan kondisi yang sebenarnya.

Dengan melihat tingkat pendidikan yang diteliti, terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP, bahwa tingkat pendidikan yang telah ditunjukkan oleh penilaian masyarakat melalui hasil kuesioner, sinkron dengan keadaan nyata, dan sesuai dengan hasil wawancara. Hal itu diketahui dengan menganalisis pendapat masyarakat yang sesuai dengan hasil wawancara. Dengan demikian tingkat pendidikan dalam penerapan kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk telah dinilai ideal atau sesuai oleh masyarakat.

Berkenaan dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP berikutnya ialah Biaya, masyarakat masih ragu-ragu terhadap biaya yang dikenakan dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP, sehingga faktor biaya dinilai oleh masyarakat belum lagi dapat dikatakan mencapai ukuran ideal penerapannya. Lalu faktor Waktu terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP, masyarakat menilai penerapan waktu dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun terhadap Perilaku pegawai terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP masih belum sesuai dengan keinginan dan keadaan yang sebenarnya, disamping itu pula terhadap sosialisasi terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP yang telah ditunjukkan pada hasil kuesioner serta wawancara dinilai belum dapat terealisasi sesuai dengan keinginan ideal, mengenai Administrasi Birokrasi terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP dapat dinilai masih belum ideal namun juga tidak buruk.

Dapat dianalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih rendah, akibat masih terdapat kekurangan atau kelemahan pada aparatur pemerintahan yang belum maksimal dan serius dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tersebut terutama terletak pada penerapan biaya, perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi yang dilakukan pemerintah.

Di samping itu, bila melihat kebijakan dari Pemerintah Daerah sendiri, bahwa dalam hal melakukan pelayanan terhadap kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilakukan, maka hal tersebut lebih kepada menjalankan suatu amanah, sebagaimana Allah meletakkan suatu standar bagi manusia untuk keadilan, untuk semua nilai, untuk semua keputusan, dan untuk semua bidang kegiatan, dalam setiap ranah kehidupan.

Standar-standar yang diletakkan sendiri oleh manusia itu tidak berlaku, karena terkadang ada cacat dalam standar-standar itu sendiri, sehingga semua nilai menjadi tumbang. Hal itu terjadi selama manusia tidak kembali kepada standar-standar yang baku dan lurus (www.eramuslim.com).

Sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

الْعَدْلُ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِ
وَاللَّهِ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَرْشَادِ الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا (58) يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ (59) الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
الْآخِرَ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa: 58-59).

BAB VI

PENUTUP

VI. 1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis paparkan di atas, maka akhirnya penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut, adalah bahwa dengan melihat adanya faktor Tingkat Pendidikan yang diteliti, terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP, bahwa Tingkat Pendidikan yang telah ditunjukkan oleh penilaian masyarakat melalui hasil kuesioner, telah sinkron dengan keadaan nyata, dan sesuai dengan hasil wawancara. Hal itu diketahui dengan menganalisis pendapat masyarakat dan menurut aparat yang terkait yaitu lurah Rejosari. Dengan demikian tingkat pendidikan dalam penerapan kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk telah dinilai ideal atau sesuai oleh masyarakat. Berkenaan dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP berikutnya ialah Biaya, masyarakat masih ragu-ragu terhadap biaya yang dikenakan dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP, sehingga faktor biaya dinilai oleh masyarakat belum lagi dapat dikatakan mencapai ukuran ideal penerapannya. Berikutnya lagi faktor Waktu terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP, masyarakat menilai penerapan waktu dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP sudah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, namun terhadap Perilaku pegawai terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP masih belum sesuai dengan keinginan dan keadaan yang sebenarnya, disamping itu pula terhadap Sosialisasi terkait dengan kepemilikan dan

kepengurusan KTP yang t 59 unjukkan pada hasil kuesioner serta wawancara dinilai belum dapat terealisasi sesuai dengan keinginan ideal, mengenai Administrasi Birokrasi terkait dengan kepemilikan dan kepengurusan KTP dapat dinilai masih belum ideal namun juga tidak buruk. Dari hasil analisis penelitian diatas maka dapat disimpulkan bahwa dari hipotesis yang telah dirumuskan dlm landasan teori diduga partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan dan kepengurusan kartu tanda penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru terletak pada tingkat pendidikan, biaya, waktu, sikap atau perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi. Dari hasil penelitian ternyata tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih rendah, akibat masih terdapat kekurangan atau kelemahan pada aparatur pemerintahan yang belum maksimal dan serius memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan dan kepengurusan KTP di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekan baru tersebut terutama terletak pada faktor penerapan biaya, perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KTP bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pengurusan KTP di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru tersebut.

VI. 2. Saran

Dengan kesimpulan di atas dan dengan masih adanya permasalahan yang dihadapi, maka dalam kesempatan ini penulis ingin mengajukan beberapa saran yang antaranya:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat khususnya terhadap kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat untuk dapat memiliki dan mengurus KTP dengan baik dan amanah;
- b. Perlu adanya pengawasan dan evaluasi terhadap faktor biaya, perilaku pegawai, sosialisasi, dan administrasi birokrasi, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih ditingkatkan guna mendukung program pemerintah dalam usaha menertibkan dan mendata masyarakat;
- c. Perlu meningkatkan atau memberi lebih banyak fungsi-fungsi dari sebuah kartu tanda penduduk (KTP) tersebut, sehingga dengan fungsi-fungsi yang dilekatkan pada sebuah KTP akan menjadikan masyarakat lebih berpartisipasi dalam kepemilikan dan kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu, 1991, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al Amin, Muhammad 2003, *Skripsi (Partisipasi Masyarakat dalam program Bina Desa Hutan Di Desa Langgam Kecamatan Langgam Kabupaten Pelelawan*, Pekanbaru: UNRI.
- Maleong, Lexy J. 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, 1998, *Partisipasi Masyarakat Dalam Program Bina Desa Hutan*, Medan, USU.
- Riwu Kho, Josef, 2002, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sastropoetro, 1998, *Partisipasi Komunikasi Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumi.
- Siagian, Sondang P. 2004, *Administrasi Pembangunan*, Bandung: Alfabeta.
- Sumantri, Jujun S. 1987, *Filsafat Ilmu Sosial*, Yogyakarta: Erlangga.
- Tim Prima Pena, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gita Persada Press.
- Thoha, Miftah 2007, *Birokrasi & Politik di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Pekanbaru Pos, Senin 23 Juni 2009.
- martin@wartaegov.com
- www.metrورياu.com
- www.pekanbaru.bpk.go.id
- www.pekanbaru.go.id
- [www.webmaster\(at\)pekanbaru.go.id](mailto:www.webmaster(at)pekanbaru.go.id)
- [www.website pemerintah provinsi riau](http://www.website.pemerintah.provinsi.riau) ©
- www.erasuslim.com ©
- QS. An-Nisa: 58-59

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1. Data Jumlah Penduduk Serta Kepemilikan dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Tahun 2007, 2008 dan 2009.....	5
Tabel V. 1 Tingkat Pendidikan Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	38
Tabel V. 2 Biaya Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	41
Tabel V. 3 Waktu Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	43
Tabel V. 4 Perilaku Pegawai Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	45
Tabel V. 5 Sosialisasi Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Penduduk Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	47
Tabel V. 6 Administrasi Birokrasi Dalam Kepemilikan Dan Kepengurusan Kartu Tanda Pendu ix Di Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.....	49

DAFTAR GAMBAR

BAGAN 1. Prosedur Pengurusan KTP di Kota Pekanbaru	4
Gambar IV. 1. Struktur Organisasi Kelurahan Rejosari Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru	30

Lampiran

KUESIONER

**ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN DAN
KEPENGURUSAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DI KELURAHAN REJOSARI
KECAMATAN TENAYAN RAYA
KOTA PEKANBARU**

Keterangan:

- a. Pertanyaan ini hanya untuk kepentingan penelitian saja.
- b. Pilih jawaban SS, S, RR, TS, atau STS dengan menceklis (✓) pada pertanyaan berikut ini sesuai kenyataan yang anda alami.
- c. Demi kerahasiaan, segera kembalikan pada pihak peneliti.
- d. Atas bantuannya diucapkan terimakasih.

Catatan:

SS	: Sangat Setuju	TS	: Tidak Setuju
S	: Setuju	STS	: Sangat Tidak Setuju
RR	: Ragu-Ragu		

A. Tingkat Pendidikan

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Dalam mengurus KTP tidak dibedakan tingkat pendidikannya.					
2	Tingkat pendidikan tidak mempengaruhi terhadap kepemilikan KTP anda.					
3	Mengurus KTP karena pendidikan anda.					
4	Anda mengurus KTP untuk keperluan pendidikan.					
5	KTP tidak perlu mencantumkan pendidikan.					

B. Biaya

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Untuk mendapatkan KTP sangat mudah dan dengan biaya ringan.					
2	Selalu ada biaya cukup untuk membayar pembuatan KTP.					
3	Pengurusan KTP tidak dikenakan biaya tambahan.					
4	Tidak ada kenaikan biaya dalam mengurus KTP tiap tahunnya.					
5	Masyarakat telah mengetahui biaya resmi dalam pembuatan KTP.					

C. Waktu

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Dalam mengurus KTP waktu yang diperlukan tidak lama.					
2	KTP siap sesuai waktu yang ditentukan.					
3	Untuk menempuh / mencapai tempat pengurusan KTP tidak makan waktu lama.					
4	Jangka waktu berlakunya KTP sesuai ketentuan.					
5	Untuk mengurus KTP ada waktu-waktu tertentu.					

D. Perilaku Pegawai

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Para pegawai telah disiplin dalam bekerja.					
2	Kerjasama para pegawai sangat baik.					
3	Tidak ada pegawai yang nakal.					
4	Pegawai ramah melayani masyarakat.					
5	Pegawai cepat bertindak dalam segala urusan.					

E. Sosialisasi

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Telah dilakukan sosialisasi dengan baik.					
2	Sosialisasi yang diberikan sudah cukup sering.					
3	Masyarakat paham dengan apa yang disampaikan pada saat sosialisasi.					
4	Sosialisasi diberikan langsung oleh pejabat terkait.					
5	Masyarakat antusias mengikuti sosialisasi.					

F. Administrasi Birokrasi

No	Pernyataan	Tanggapan				
		SS	S	RR	TS	STS
1	Administrasi birokrasi yang ada di Pemerintahan sekarang sudah cukup baik.					
2	Pelayanan yang diberikan dalam kepengurusan KTP sudah sesuai dengan standar mutu.					
3	Tidak perlu lagi ada penambahan fasilitas pelayanan.					
4	Administrasinya telah dengan baik dilakukan guna melayani masyarakat.					
5	Peralatan pembuatan KTP sudah cukup lengkap.					

Pekanbaru, September 2009

Responden

()